

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI UNTUK INTEGRASI CAPAIAN DAN TARGET PADA PROGRAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Eni Heldayani¹, Dani Saputra², Via Yanti Mala³

¹Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas PGRI Palembang

²Peneliti Madya Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Selatan

³Peneliti Tingkat Pertama Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Selatan

ABSTRAK

Pemanfaatan data dan informasi kependudukan dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dewasa ini informasi kependudukan setiap wilayah di Indonesia sudah bersifat aktual, lengkap dan akurat. Hanya saja pemanfaatannya belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan SIG untuk mengintegrasikan data capaian dan target pada program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian sensus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder dari publikasi instansi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui 3 tahap yakni 1) pemetaan data capaian KKBPK tahun 2015, 2) analisis pola capaian KKBPK tahun 2015 dan 3) mensintesisnya dengan target Program KKBPK tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan adanya trend positif antara capaian dan target Program KKBPK di Provinsi Sumatera Selatan, dimana rata-rata capaian melebihi target yang ditetapkan. Integrasi menggunakan GIS mampu memberikan sudut pandang yang berbeda dari analisis tabular karena mampu mengekspresikan fenomena kerungan dan kompleks wilayah. Dengan demikian diharapkan dapat membantu perencana program (pemerintah) dalam menetapkan skala prioritas program pembangunan dan sehingga intervensi program tepat sasaran.

Kata Kunci : KKBPK, GIS, Provinsi Sumsel

PENDAHULUAN

Salah satu isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS (BKKBN, 2015). Dalam rangka memperkuat implementasi KKBPK, diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penyediaan data dan informasi BKKBN yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian permasalahan yang dihadapi BKKBN sekarang justru adalah banyaknya data KKBPK yang akurat dan aktual namun belum termanfaatkan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas data yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dilakukan analisis dan banyaknya penggunaan

istilah lokal yang kurang familiar di kalangan praktisi, akibatnya hingga sekarang sangat jarang ditemukan penelitian dan program pemerintah yang dijalankan dengan memanfaatkan data KKBPK sebagai salah satu bahan analisis. Dengan demikian terdapat kebutuhan berupa penyederhaan informasi sehingga data BKKBN yang berharga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Tampilan data yang lebih sederhana namun kaya akan informasi akan memudahkan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG). Hal ini karena pada dasarnya seluruh fenomena geografi yang ada di muka bumi termasuk didalamnya adalah fenomena kependudukan dapat diolah, disajikan dan dianalisis menggunakan SIG menjadi suatu bentuk informasi yang sederhana, komprehensif, memuat sifat keruangan dan dapat dianalisis secara kompleks wilayah yang disebut dengan peta.

Penggunaan SIG untuk memetakan data-data KKBPK sangat mungkin dilakukan karena pada dasarnya pada setiap data sekunder (tabular) KKBPK sudah memiliki referensi spasial atau unit pemetaan berupa administrasi kabupaten. Akan tetapi referensi tersebut masih bersifat relatif belum bersifat absolut. Untuk membuat data KKBPK memiliki referensi spasial absolut adalah dengan menggabungkannya dengan data spasial atau peta administrasi kabupaten Sumatera Selatan, karena pada Peta Administrasi Kabupaten Sumatera Selatan terdapat informasi posisi (x dan y) dari masing-masing kabupaten.

Data spasial KKBPK dapat diolah, diklasifikasi dan disimbolkan sedemikian rupa menggunakan SIG sesuai jenis data, sifat data dan tema data layaknya operasi statistik pada umumnya. Perbedaan hasil visualisasi menggunakan SIG adalah posisi dari setiap data akan langsung dapat terekspresikan dan apabila terbentuk suatu pola keruangan dapat disimpulkan secara kompleks wilayah, hal yang tidak dapat dilakukan dengan hanya analisis data tabular atau analisis grafik atau analisis trend dalam statistik umum. Sebaliknya visualisasi data dalam bentuk grafik (batang & pie), pengelompokan data dan analisis trend dapat dilakukan menggunakan SIG (Heldayani, 2015).

Keberhasilan dari program KKBPK 2015 di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari indikator keberhasilan yang telah dituangkan di dalam RPJM BKKBN 2015-2019, begitu pula sebaliknya. Diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan cerdas untuk memanfaatkan data yang telah diperoleh agar arahan kebijakan tepat sasaran dan sesuai dengan RPJM BKKBN dan SIG adalah merupakan solusinya.

METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian sensus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder dari publikasi instansi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota.

Pengolahan data dimaksudkan agar memudahkan dalam analisis data. Pengolahan data untuk penelitian dilakukan dengan cara *overlay* antara data eksisting capaian KKBPK Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dengan target KKBPK 2015. Adapun tahapannya adalah 1) pemetaan data capaian KKBPK tahun 2015, 2) analisis pola capaian KKBPK tahun 2015 dan 3) mensintesiskannya dengan target Program KKBPK tahun 2015

Setelah pengolahan data dilakukan, selanjutnya adalah tahap analisis. Tahap analisis adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya menjawab tujuan penelitian. Peneliti menggunakan cara analisis data dengan pendekatan keruangan yang difokuskan pada analisis pola keruangan. Analisis pola keruangan menempatkan ruang sebagai variabel utama. Analisis ini memperhatikan hubungan yang erat antara bentuk dan sifat dari persebaran data capaian KKBPK Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dengan target capaian tahun 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan baik menyangkut kuantitas, kualitas, persebaran, dan database kependudukan merupakan peluang dan tantangan yang harus diatasi guna tercapainya keberhasilan pembangunan. Kerjasama yang baik dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situasi dan kondisi kependudukan dibutuhkan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan kaitannya pengendalian pertumbuhan penduduk adalah pengaturan kelahiran atau program keluarga berencana (KB) melalui program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Keberhasilan dalam program pengendalian penduduk memerlukan keselarasan antara kebijakan di bidang pengendalian penduduk dengan kebijakan pembangunan bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk untuk menciptakan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam rangka memperkuat implementasi KKBPK, diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penyediaan data dan informasi BKKBN yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan (Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga). Data dan informasi memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Perkembangan program KKBPK dapat diketahui melalui laporan data statistik rutin dan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara berkala dan kontinyu. Evaluasi dilakukan dengan pemantauan sasaran kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) yang telah disepakati dengan tujuan untuk membandingkan dengan sasaran, kebijakan, strategi, dan program kegiatan yang telah direncanakan. Umumnya evaluasi program KKBPK dilakukan dengan metode *Desk Descriptive Analysis* untuk memperoleh gambaran tentang data dan informasi yang dianalisis.

Pada penelitian ini, program KKBPK yang diamati adalah tidak secara keseluruhan dilakukan, peneliti memfokuskan hanya pada pencapaian peserta KB Aktif, Peserta KB Baru, dan Unmet Need tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, peneliti mencoba untuk menambah *value* dari hasil evaluasi dengan memanfaatkan atau mengkolaborasi metode *Desk Descriptive Analysis* dengan Sistem Informasi Geografi untuk memperoleh gambaran tentang data dan informasi sehingga memudahkan pemangku kebijakan untuk merumuskan arahan kebijakan berdasarkan analisis spasial/keruangan.

Review RPJMN BKKBN 2015-2019

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi RPJMN tahap tiga. Keberhasilan program KKBPK erat kaitannya dengan capaian dari target RPJM BKKBN. Target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah 1) menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), 2) menurunkan angka kelahiran total (TFR), 3) meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), 4) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), 5) menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun), serta 6) menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun). Sasaran target yang tertuang dalam RPJM BKKBN 2015-2019 merupakan hasil dari isu/permasalahan kependudukan secara nasional yang disepakati dan dituangkan dalam RPJMN dengan harapan menjadi indikator dari keberhasilan program KKBPK di setiap wilayah.

Tabel 1
Sasaran Program KKB dalam RPJMN 2015-2019

Sasaran RPJMN	Status Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,49	1,38	1,27	1,25	1,23	1,23
b. Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
c. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) <i>all method</i>	61,9	65,2	65,4	65,6	65,8	66
d. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	11,4	10,6	10,48	10,26	10,14	9,91
e. Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	48 per 1000	46 per 1000	44 per 1000	42 per 1000	40 per 1000	38 per 1000
f. Persentase Kehamilan yang Tidak diinginkan dari WUS (15-45 tahun)	7,1	7,1	7	6,9	6,8	6,6

(sumber : BKKBN, 2015)

RPJMN BKKBN 2015-2019 pada intinya adalah tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 arah kebijakan yang dirumuskan dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan terdiri dari delapan arah kebijakan antara lain 1) meningkatkan akses pelayanan KB yang merata, 2) meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi, 3) menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi, 4) meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, 5) menyasrakan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, 6) menata dan menguatkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah, 7) meningkatkan ketersediaan data dan informasi kependudukan, 8) memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB.

Salim (2014) menyatakan bahwa parameter kependudukan yang dapat dimasukkan dalam RPJMD antara lain: a) Laju pertumbuhan penduduk (LPP), b) rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia reproduktif (TFR), c) kelahiran per 1000 wanita usia reproduktif (GFR), d) jumlah kelahiran per 1000 penduduk (CBR), e) rasio anak perempuan (CWR), f) rata-rata jumlah anak per keluarga, g) rasio akseptor KB, h) cakupan peserta KB Aktif, i) keluarga Pra KS dan KS1, j) rata-rata usia kawin pertama, k) pasangan usia subur (PUS) ingin berKB tidak terpenuhi (*unmetneed*), l) partisipasi pria dalam KB, m) Pasangan

Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun, n) cakupan anggota BKB yang ber KB, o) cakupan BKB yang berKB, p) cakupan BKR yang berKB, q) cakupan BKL yang berKB, r) cakupan PUS anggota UPPKS yang berKB, dan s) rasio PLKB/PKB Desa.

Pada dasarnya mengembangkan dan menseleksi data-data tersebut diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data di Provinsi Sumatera Selatan telah di inventaris dengan cukup baik. Data dan informasi yang representatif terhadap dinamika demografi suatu daerah dapat membantu pengelola program kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kinerja program kependudukan dan KB di daerah. Tiap daerah tentunya merumuskan kontrak kinerja yang digunakan sebagai dasar sasaran/target kerja pada tiap tahunnya untuk mengukur keberhasilan program kependudukan yang telah dilakukan, sama halnya dengan Provinsi Sumatera Selatan, kontrak kinerja menjadi dasar bagi masing-masing Kabupaten untuk mencapai sasaran/target kerja.

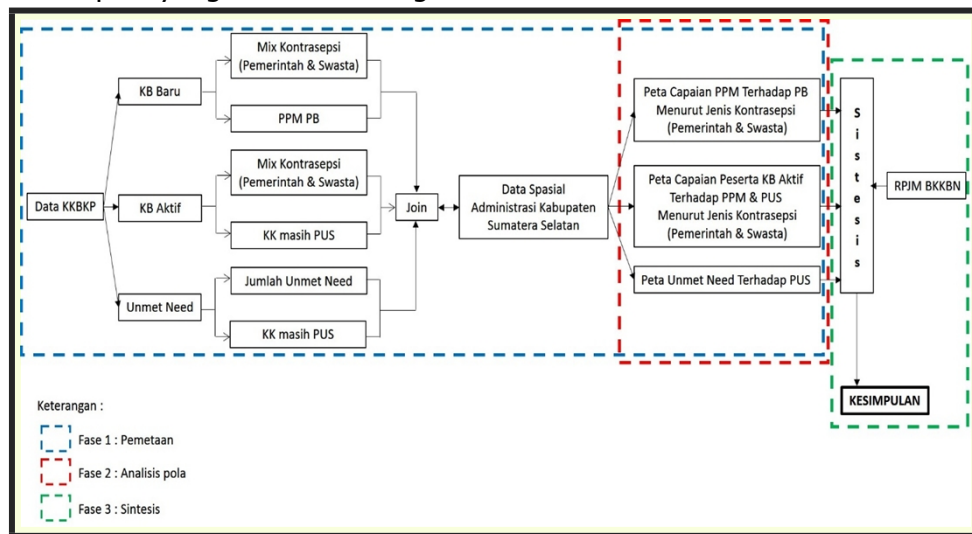
Integrasi Data Capaian KKBPK dengan Target KKBPK

Pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah merupakan langkah strategis untuk menjamin program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintahan daerah sebagai pembuat keputusan untuk keberhasilan program KKB. Pada buku Panduan Integrasi Kebijakan Kependudukan Kedalam Rencana Pembangunan Daerah yang telah dibuat oleh BKKBN pada tahun 2014 telah menetapkan cara-cara pengintegrasian menjadi 2 proses yakni integrasi secara politis dan integrasi secara demografis.

Proses politis yang dilakukan dalam rangka integrasi kebijakan kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah adalah untuk memperoleh dukungan serta upaya meningkatkan komitmen dari sektor-sektor yang secara teknis saling terkait dan berkepentingan terhadap pembangunan di daerah. Harapannya sektor-sektor tersebut memiliki kesamaan tentang konsep dan definisi operasional tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan di daerah. Adapun langkah-langkah integrasinya meliputi : a) Identifikasi daerah yang akan/ sedang melangsungkan pemilihan kepala daerah, b) identifikasi daerah yang sedang menyusun dokumen perencanaan, c) advokasi integrasi kebijakan kependudukan kedalam RPJMND.

Proses integrasi selain proses politis dalam rangka pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam Rencana Pembangunan Daerah adalah perlu melalui proses demografis. Proses demografis antara lain dengan pembentukan Forum Data Daerah serta penyusunan profil kependudukan yang bisa diakui bersama untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Strategis Daerah (renstrada) maupun dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan RPJMD, juga terdapat tahapan penetapan parameter kependudukan, tahapan konsultasi sebagai bagian dari penentuan sasaran RPJMD dan uji publik. Adapun langkah-langkah integrasinya meliputi : a) penetapan parameter kependudukan, b) tahap konsultasi, c) uji publik. Dua proses integrasi yang diuraikan tersebut adalah yang tertuang di buku panduan BKKBN. Pada penelitian ini, Integrasi yang dimaksud adalah Integrasi antara data KKBPK tahun 2015 Sumatera Selatan dengan RPJM BKKBN tahun 2015-2019 dimulai dengan menetapkan seluruh parameter

terkait, dilanjutkan dengan menganalisis pola yang terekspresikan dan terakhir mensintesis pola yang terbentuk dengan dokumen RPJM BKKBN.



Gambar 1. Alur Integrasi Data Menggunakan SIG

Pemetaan dimulai dengan menggabungkan data spasial administrasi Kabupaten dengan data tabular KKBPK yaitu Jumlah Peserta KB Baru Jalur Pemerintah & Swasta, caranya adalah dengan menggunakan *join attribute*. *Join attribute* merupakan operasi dalam SIG yang digunakan untuk menggabungkan data attribute dari dua theme yang bertampalan. Kabupaten merupakan komponen data yang tersedia pada data spasial administrasi dan data BKKBK yang dapat dijadikan informasi kunci untuk menggabungkan keduanya, hasilnya adalah data spasial KKBPK dengan Kabupaten sebagai unit pemetaan.



Gambar 2. Proses kerja Integrasi melalui pendekatan keruangan

Penyusunan peta dimulai dengan simbolisasi data spasial KKBPK hasil join dalam bentuk grafik (pie & batang) dan area kluster sesuai jenis dan sifat data KKBPK, layaknya analisis statistik pada umumnya. Informasi toponomi berupa nama Kabupaten ditambahkan untuk memberikan keterangan dimanakah grafik (*pie* & batang) dan area kluster tersebut terwakilkan. Unsur-unsur kartografi seperti arah utara, skala, legenda dan grid koordinat juga ditambahkan sebagai bagian dari penyusunan peta KKBPK.

Pencapaian Peserta KB Baru menurut Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM)

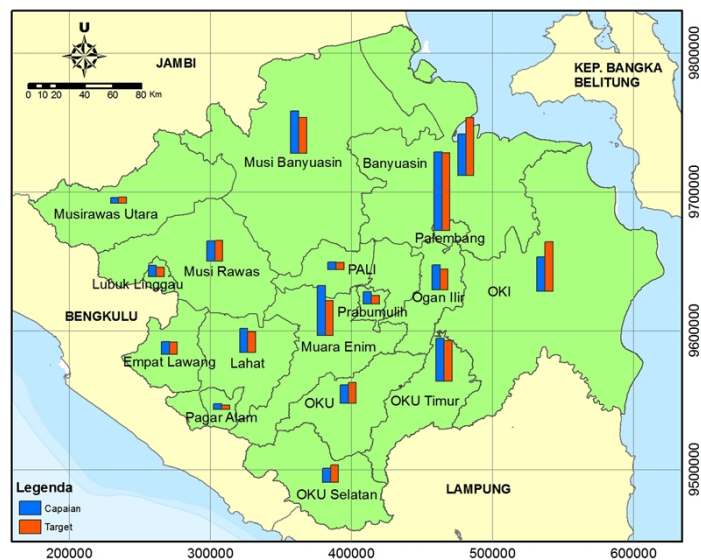
Peserta KB Baru adalah Akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 telah menetapkan perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB baru adalah 231.022 pasangan.

Ketetapan tersebut pada bulan Desember 2015 melampaui target dimana tercatat perolehan peserta KB Baru sebanyak 232.157 pasangan.

Berdasarkan data capaian peserta KB Baru (PB) menjadi dasar untuk penyusunan peta pertama yakni Peta Capaian Peserta KB Baru terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Peta ini dibuat dengan menampilkan perbandingan antara target PPM dengan capaian Peserta KB Baru dalam bentuk diagram batang, sekaligus ditampilkan Kabupaten/Kota mana sajakah yang lebih atau sama dengan target PPM dan dibawah target PPM. Ukuran diagram batang merepresentasikan total capaian peserta KB Aktif dan target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM).

Sebaran capaian peserta KB Baru terhadap PPM pada tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan variasi yang beragam. Terdapat 11 Kab/Kota yang masuk kedalam kelompok dengan pencapaian PB terhadap PPM lebih atau sama dengan target antara lain Kab/Kota Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Oku Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Pali, Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau, dan Prabumulih. Sedangkan kelompok dengan pencapaian PB terhadap PPM dibawah target terdapat 6 kelompok yaitu Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Musi Rawas, Musirawas Utara.

Pola yang terbentuk untuk capaian peserta KB mengesankan Kabupaten/Kota yang memiliki capaian lebih atau sama dengan target berada di lokasi tengah provinsi atau dekat dengan Ibu Kota Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki capaian dibawah target mengesankan berada di lokasi pinggiran Ibu Kota Provinsi.



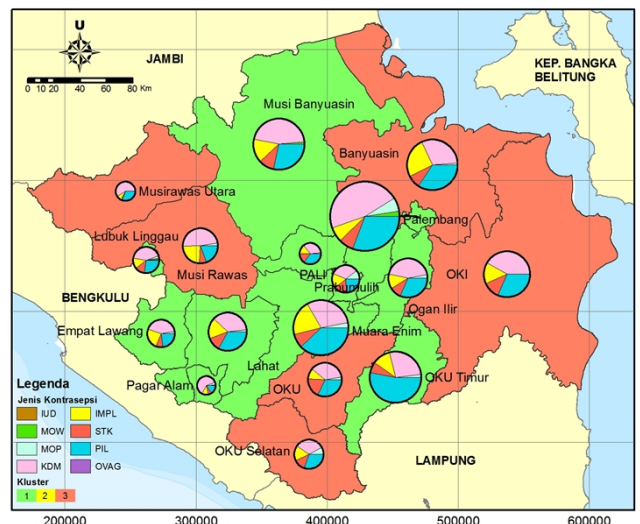
Gambar 3. Pencapaian Peserta KB baru menurut Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) tahun 2015 (sumber : Rek.Kab.F/II/KB/13)

Partisipasi peserta KB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan melebihi target dimungkinkan karena tuntutan gaya hidup (*lifestyle*) yang mendorong pasangan usia subur meningkat untuk berpartisipasi menjadi peserta KB, sedangkan Kabupaten/kota yang berada di pinggiran memiliki capaian kurang dari target dimungkinkan karena faktor budaya yang berkembang di daerah misalnya salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode, kepercayaan religius, serta budaya, tingkat pendidikan. Penyedia layanan harus menyadari bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi peserta KB Baru.

Pencapaian Peserta KB Baru (PB) menurut Jenis Kontrasepsi yang digunakan (Pemerintah dan Swasta)

Keinginan berpartisipasi menjadi peserta KB Baru memiliki tren terhadap metode yang dirasa nyaman oleh peserta untuk dipilih. Pencapaian peserta KB Baru untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan menurut jenis kontrasepsi yang digunakan pada tahun 2015 menunjukkan keberhasilan yang melampaui target.

Peta kedua yang disusun adalah Peta Capaian PPM Terhadap PB Menurut Jenis Kontrasepsi (Pemerintah & Swasta) Kabupaten Sumatera Selatan. Peta ini dibuat dengan mensintesis tiga informasi sekaligus, yaitu informasi perbandingan jumlah jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB baru pada setiap kabupaten dalam bentuk diagram pie (semakin banyak jumlah pengguna maka semakin besar proporsi pie dan sebaliknya); informasi prosentase capaian program KB baru terhadap PPM masing-masing kabupaten apakah melebihi (>100%) atau kluster 1, sama (100%) atau kluster 2; kurang dari (<100%) atau kluster 3 target yang ditetapkan dalam bentuk kluster area; dan informasi total capaian PB baru masing-masing Kabupaten dalam variasi ukuran (semakin besar maka semakin tinggi capaian).



Gambar 4. Peta Pencapaian Peserta KB Baru (PB) menurut Jenis Kontrasepsi yang digunakan tahun 2015 (*sumber : Rek.Kab.F/II/KB/13*)

Secara variasi sebaran capaian jenis kontrasepsi yang diminati pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan jenis kontrasepsi yang paling diminati ada tiga yakni kondom, IUD, dan Implant. Total pencapaian PB belum melampaui target, namun demikian apabila dilihat per masing-masing Kabupaten/Kota per metode kontrasepsi IUD, MOW, MOP, Implant, dan Pil dapat melampaui target kecuali Suntikan. PB Suntikan belum melampaui target karena kondisi ketersediaan suntikan di gudang Provinsi maupun Kabupaten/Kota terbatas atau tidak mampu mencukupi kebutuhan akseptor di lapangan.

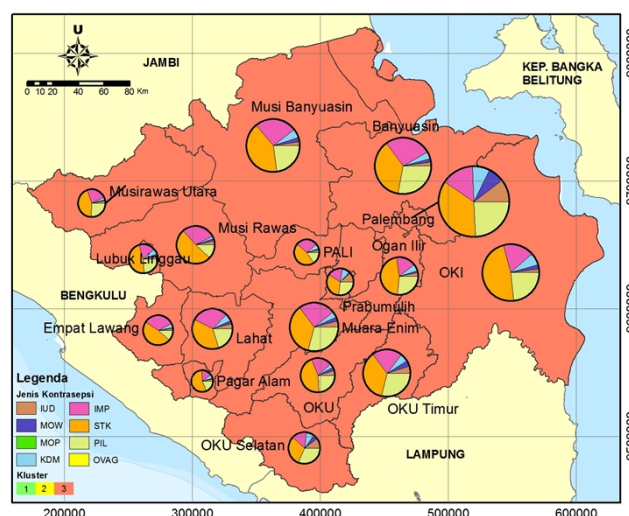
Pencapaian PB terhadap PPM PB menurut Jenis Kontrasepsi pada Masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan variasi sebaran berpola menyebar. Secara umum capaian PB terhadap PPM PB pada masing-masing Kabupaten/Kota berpola menyebar dengan keberhasilan target mencukupi kebutuhan akseptor. Secara persentase capaian jenis kontrasepsi Kondom pada masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun 2015 telah tercapai

21.488 akseptor atau 360,11% terhadap PPM yang telah ditetapkan tahun ini sebesar 5.967. Besarnya angka pencapaian absolut PB Kondom karena Kondom merupakan metoda kontrasepsi yang relatif diminati pada tahun ini. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi KB Pria utamanya Kondom tinggi. Hal ini merupakan hal yang positif dalam upaya partisipasi KB Pria. Pada tingkat kab/kota, hampir seluruh kab/kota berhasil melampaui target bulanan, namun demikian tidak semua Kabupaten/Kota yang relatif meminati jenis kontrasepsi Kondom, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU Timur lebih meminati jenis kontrasepsi PIL dibandingkan Kondom. Tentunya kenyamanan pada masing-masing masyarakat yang memiliki budaya sosial yang beragam menjadi pemicu perbedaan peminatan jenis kontrasepsi yang dipilih.

Pencapaian Peserta KB Aktif terhadap PUS menurut Jenis Kontrasepsi (Pemerintah dan Swasta)

Peserta KB Aktif adalah Akseptor yang ada pada saat ini menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Penetapan jumlah peserta KB Aktif (PA) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 adalah 1.045.909 pasangan. Capaian yang diperoleh pada tahun 2015 adalah 1.289.728 pasangan atau melebihi target sebesar 123, 31%. Pada tingkat Kabupaten/Kota masing-masing telah tercapai melebihi target.

Peta ketiga yang disusun yakni Peta Capaian Peserta KB Aktif Terhadap PUS Menurut Jenis Kontrasepsi (Pemerintah & Swasta). Sama halnya dengan peta pertama pada peta kedua ini juga dibuat dengan mensintesis tiga informasi sekaligus, yaitu informasi perbandingan jumlah jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif pada setiap kabupaten dalam bentuk diagram pie; masing-masing diagram pie akan memiliki ukuran yang berbeda tergantung total capaian masing-masing kabupaten; informasi prosentase capaian program KB aktif terhadap PUS masing-masing kabupaten apakah melebihi (>100%) atau kluster 1, sama (100%) atau kluster 2; kurang dari (<100%) atau kluster 3 target yang ditetapkan dalam bentuk kluster area.



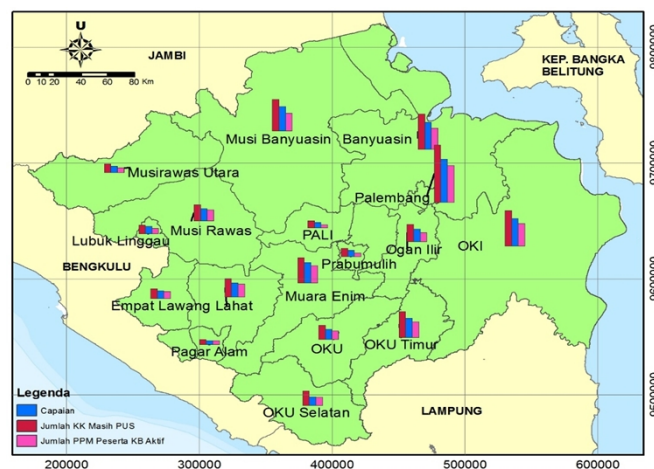
Gambar 5. Pencapaian Peserta KB Aktif terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2015 (*sumber : Rek.Kab.F/II/KB/13*)

Capaian peserta KB Aktif terhadap PUS secara provinsi pada bulan Desember 2015 tercapai 76,13%. Kab/kota yang capaian PA terhadap Total PUS diatas capaian provinsi terdapat 9 (sembilan) kab/kota yaitu OKI, Muara Enim, Musi Banyuasin Banyuasin, Empat Lawang, PALI, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. Secara variasi sebaran capaian jenis kontrasepsi yang diminati pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk PB Aktif menunjukkan jenis kontrasepsi yang paling diminati adalah IUD, MOW, Implant, dan MOP. Total pencapaian PB aktif telah tercapai melampaui target diatas 100 persen sehingga dari hasil peta yang disusun tidak menunjukkan adanya variasi sebaran capaian yang berbeda antar masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Capaian Peserta KB Aktif terhadap Jumlah KK PUS

Pencapaian PB terhadap PPM PB menurut Jenis Kontrasepsi pada Masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan sebaran berpola merata/teratur. Secara umum capaian PB terhadap PPM PB pada masing-masing Kabupaten/Kota berpola merata/teratur dengan keberhasilan target mencukupi kebutuhan akseptor. Pencapaian provinsi PA MKJP pada bulan ini sebesar 388.336 atau 202,4% terhadap PPM yang ditetapkan. Pada tingkat kab/kota hampir seluruh Kab/Kota telah tercapai diatas 100% dengan rentang data capaian antara 111,0% (Pagar Alam) sampai dengan 330,4% (PALI).

Capaian peserta KB Aktif juga dibandingkan terhadap dengan Jumlah KK Masih PUS dan PPM Peserta KB Aktif. Peta ini dibuat dalam bentuk diagram batang yang berisi perbandingan capaian program KB aktif dengan Jumlah KK Masih PUS dan PPM Peserta KB Aktif. Secara variasi sebaran capaian peserta KB Aktif terhadap jumlah KK masih PUS pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum melampaui target. Pencapaian peserta KB aktif terhadap jumlah KK masih PUS menunjukkan tidak adanya variasi sebaran atau mengekspresikan pola merata. Secara umum capaian PB terhadap PPM PB pada masing-masing Kabupaten/Kota berpola merata dengan capaian keberhasilan target belum mencukupi kebutuhan akseptor. Tentunya kenyamanan pada masing-masing masyarakat yang memiliki pilihan yang beragam menjadi pemicu perbedaan partisipasi PUS untuk aktif melakukan peminatan pengendalian kelahiran melalui metode/jenis kontrasepsi yang dipilih.

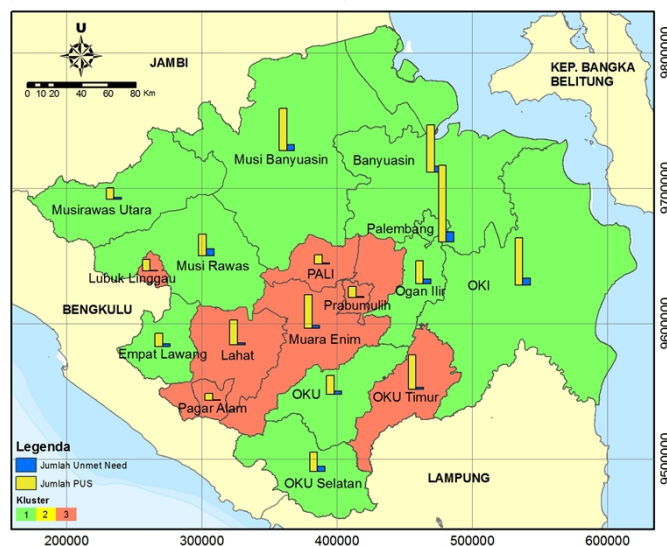


Gambar 6. Capaian Peserta KB Aktif terhadap Jumlah KK Masih PUS tahun 2015 (sumber : Rek.Kab.F/II/KB/13)

Pencapaian Unmet Need

Keterjangkauan pemerintah dalam upaya memenuhi permintaan akan pelayanan KB memiliki keterbatasan sehingga terdapat kelompok yang kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang Sudah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan atau Masih Ingin Punya Anak Tetapi Ditunda (IAT) dan tidak menggunakan salah satu cara kontrasepsi (*unmet need*)

Peta kelima adalah Peta Unmet Need Terhadap PUS. Pada peta keempat ini sedikit berbeda karena tidak menyajikan capaian jumlah alat kontrasepsi dan hanya menyajikan perbandingan jumlah PUS dengan jumlah unmet need saja. Pada peta kelima dibuat dengan mensintesis 2 informasi yakni grafik perbandingan pencapaian Unmet Need dengan jumlah PUS dalam bentuk diagram batang, masing-masing diagram batang akan memiliki ukuran yang berbeda tergantung total capaian masing-masing Kabupaten/Kota, informasi prosentase capaian Unmet Need dengan jumlah PUS masing-masing kabupaten dengan area zonasi persentase unmet need terhadap PUS masing-masing kabupaten apakah >12.7% atau kluster 1, 10-12.7% atau kluster 2; <10% atau kluster 3.



Gambar 7. Pencapaian Unmet Need terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2015 (Sumber: Rek.Kab.F/I/DAL/13)

Jika dilihat berdasarkan sebaran tingkat Kabupaten/Kota dapat menunjukkan suatu pola sebaran yang mengekspresikan sebaran yang tidak merata atau acak. Pola pertama yakni terdapat sepuluh kab/kota dengan pencapaian unmet need lebih tinggi dari target atau masuk pada klaster 1 yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas, OKI, Prabumulih, Muratara, Ogan Ilir, OKU, dan OKU Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan Unmetneed di bawah target terdapat lima Kabupaten/Kota yaitu Linggau, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, dan Pali. Ditinjau dari akses keterjangkauan lokasi, Kabupaten/Kota yang berada dibawah target berada di lokasi jauh dari pusat kota. Diperlukan upaya-upaya yang mempunyai daya dorong dan daya tarik yang tinggi dalam meningkatkan pelayanan KB bagi calon akseptor didaerah khusus dengan peningkatan akses informasi dan akses pelayanan KB Mobile (bergerak), sehingga unmet need dapat diturunkan hingga 7,5% di tahun mendatang, terutama di Kabupaten/Kota yang unmetneed nya tinggi.

Kelebihan dan Kelemahan Integrasi Data Capaian KKBPK dengan Target KKBPK menggunakan Sistem Informasi Geografi

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sistem cerdas yang dapat dimanfaatkan untuk membantu manusia (*user*) untuk membuat suatu keputusan. SIG adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan data informasi berupa visualisasi. Pengembangan aplikasi atau program SIG semakin hari terus berkembang pesat.

Kelemahan Sistem Informasi Geografi kaitannya dengan integrasi data capaian KKBPK dengan Target KKBPK adalah terkait kualitas luaran hasil integrasi dan kualitas data sekunder. Kualitas luaran hasil integrasi menggunakan SIG sangat bergantung pada kualitas input. Apabila kualitas input bermasalah maka hasil integrasi juga kurang akurat dan begitu pula sebaliknya (*GIGO* atau *garbage in garbage out*). Kualitas data sekunder di Indonesia pada umumnya tidaklah sama dalam hal aktualitas data, terdapat data yang diperbaharui setiap bulan, setiap tahun, setiap 5 tahun dan seterusnya. Data KKBPK yang diolah dalam penelitian ini adalah data Tahun 2015 (bulan Desember) yang menyajikan variasi dari 17 kabupaten di Sumatera Selatan, dengan demikian paling tidak dibutuhkan data spasial administrasi kabupaten dengan isi data yang sama (17 kabupaten). Perlu diketahui bahwa data spasial batas administrasi setiap waktu dapat berubah, terdapat wilayah pemekaran dan terdapat pula wilayah yang digabung. Pada penelitian ini data spasial administrasi yang diperoleh dari BIG adalah data tahun 2015 yang masih bersifat draft untuk disepakati pengajuannya tahun 2016. Apabila terjadi ketidaksamaan jumlah kabupaten diantara data KKBPK dan data spasial administrasi maka jumlah data yang lebih banyak akan hilang atau kosong.

Kelebihan Sistem Informasi Geografi kaitannya dengan integrasi data capaian KKBPK dengan Target KKBPK antara lain 1) relatif cepat dan mudah dalam pembuatan sebuah visualisasi informasi KKBPK menggunakan SIG, karena kemampuan tersebut sudah menjadi fungsi dasar dari SIG, 2) Dapat menghasilkan informasi yang komprehensif karena memungkinkan penyusunan lebih dari satu informasi dalam sebuah peta dengan metode *multiple symbol*, 3) Memungkinkan penggabungan data *attribute* (sekunder) dengan data spasial, 4) Sintesa data dan variabel terkait dapat dilakukan dengan mudah sehingga pengambilan kesimpulan yang memperhatikan pola keruangan dan kompleks wilayah dapat dilakukan

KESIMPULAN

Pemanfaatan data dan informasi kependudukan dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan data dan informasi melalui integrasi dengan sistem cerdas dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tahapan integrasi data capaian KKBPK dengan Target KKBPK yang dapat dilakukan meliputi pemetaan data capaian KKBPK tahun 2015, analisis pola capaian KKBPK tahun 2015 dan mensintesiskannya dengan Target KKBPK tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan adanya trend positif antara capaian KKBPK tahun 2015 dengan Target KKBPK tahun 2015., dimana rata-rata capaian melebihi target yang ditetapkan. Integrasi menggunakan GIS mampu memberikan sudut pandang yang berbeda dari analisis tabular karena mampu mengekspresikan fenomena keruangan dan kompleks

wilayah. Dengan demikian diharapkan dapat membantu perencana program (pemerintah) dalam menetapkan skala prioritas program pembangunan dan sehingga intervensi program tepat sasaran

REKOMENDASI

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa integrasi data capaian KKBPK dengan capaian KKBPK menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat menjadi alternatif solusi untuk manajemen data dan informasi kependudukan berbasis spasial. Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Pengembangan teknologi informasi kependudukan berbasis spasial, pemanfaatan SIG relatif cepat dan mudah dalam penyusunan visualisasi informasi KKBPK karena kemampuan tersebut sudah menjadi fungsi dasar dari SIG. Selain itu, SIG mampu menyusun lebih dari satu informasi dalam sebuah peta dengan metode multi simbol dan informasi yang ditampilkan dapat membantu pembuat keputusan untuk merumuskan arahan berbasis spasial.
2. Manajemen Inventarisasi data dan informasi kependudukan sangat penting dilakukan. Dinamika data kependudukan yang sangat dinamis dapat memungkinkan pembuat kebijakan tidak mengetahui berapa tepatnya profil kependudukan di lapangan. SIG dapat membantu dalam menginventaris data non spasial yang didapatkan dilapangan menjadi data spasial sehingga aman dan lebih memudahkan pembuat kebijakan untuk diolah dan dianalisis sebagai bahan dasar pertimbangan penyusunan arahan kebijakan dengan acuan data kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronoff S. 1991. *Geographical Information System: A management perspectives*. Ottawa: WDL Publications.
- Burrough P.A. and McDonnell R.A. 1998. *Principles of Geographical Information Systems*. New York: Oxford University Press.
- BKKBN. 2014. *Panduan Integrasi Kebijakan Kependudukan Kedalam Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta : BKKBN
- BKKBN. 2015. *Optimalisasi Program Pengendalian Penduduk*. Jakarta: Deputi Dalduk BKKBN Pusat.
- BKKBN. 2015. *Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019*. Jakarta : BKKBN
- Barus B., dan Wiradisastira. 2000. *Sistem Informasi Geografi*. Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi : Institut Pertanian Bogor.
- ESRI. 1997. *Understanding GIS: the ArcInfo Method*. Redlands, CA: ESRI Pre
- Eddy Prahasta. 2001. *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. Bandung: Informatika.
- Heldayani, Eni. 2015. *Pengantar Sistem Informasi Geografi*. Modul Bahan Ajar : Universitas PGRI Palembang.
- Herartri, Dkk. 2011. *Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan*. Jakarta: Policy Brief. Seri I No. 3/Pusdu-Bkkbn/Desember 2011.
- Misra. 1982. *Konsep Dasar Demografi*. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

- Mantra, Ida Bagus. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muta'ali, Luthfi.2000. *Tehnik Analisa Regional*. Jogjakarta: Jurusan PPW Fakultas Geografi, UGM
- Salim, Lutfi Agus. 2014. *Integrasi Parameter Kependudukan dan KB Dalam RPJMD*. Pemaparan Pembinaan SDM di Banten, 28-30 Oktober 2014.
- Suratun, dkk. 2008. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Trans Info Media : Jakarta
- Surapaty, Surya Candra. 2015. *Bahan Kuliah Umum : Revolusi Mental Generasi Muda bagi Mahasiswa STIKI Indonesia* pada 28 Januari 2015. Denpasar, Bali.
- Tarmizi, Nurlina. 2012. *Tri Matra Kependudukan*. Palembang: Unsri Press 2012
- Wangke, Humphrey. 2014. Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Info Singkat Hubungan Internasional (Kajian singkat terhadap isu-isu terkini). *Vol VI. No. 10/II/P3DI/Mei/2014*